

Telaah akar hyperinflasi: Kajian terhadap krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998

Risky Alamsyah^{1*}, Muhammad Rifqi Aditya²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *220102110024@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hiperinflasi; krisis moneter;
Indonesia; akar; 1997-1998

Keywords:

hyperinflation; monetary
crisis; Indonesia; roots;
1997-1998

ABSTRAK

Penelitian ini berorientasi untuk mengkaji akar dari hyperinflasi yang terjadi selama krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cara menelaah semua refrensi baik berupa artikel, jurnal, maupun buku yang selaras dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder yang didapat dari jurnal, artikel, buku, dokumentasi, web, brousur, serta media elektronik yang selaras dengan tujuan penelitian. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa akar hyperinflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 meliputi;

(1) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, (2) Tingginya hutang luar negeri, (3) Kebijakan International Monetary Fund (IMF) yang gagal, (4) Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi krisis.

ABSTRACT

This research is oriented to examine the roots of hyperinflation that occurred during the monetary crisis in Indonesia in 1997-1998. This research uses a literature review type of research conducted by reviewing all references in the form of articles, journals, and books that are in line with the research title. The data collection method used in this research is secondary data obtained from journals, articles, books, documentation, web, brochures, and electronic media that are aligned with the research objectives. The results of this study state that the roots of hyperinflation that occurred in Indonesia in 1997-1998 include; (1) Weakening of the Rupiah Exchange Rate against the US Dollar (2) High Foreign Debt (3) Failed International Monetary Fund (IMF) Policies (4) Government Inability to Overcome the Crisis.

Pendahuluan

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern (Fahrika & Zulkifli, 2018). Krisis ini ditandai dengan jatuhnya kurs secara drastis, lonjakan inflasi yang sangat tinggi, serta jatunya sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia (Maulidia et al., 2023). Peristiwa tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Indonesia.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwasanya salah satu penyebab utama dari terjadinya hyperinflasi yang terjadi di Indonesia adalah ketidakstabilan kurs Indonesia terhadap dolar Amerika (Sakir et al., 2020). Menurut penelitian Ginting &



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nasution (2020), devaluasi tajam kurs indonesia terhadap dolar amerika pada tahun 1997 menjadi pemicu utama kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya hyperinflasi di Indonesia. Selain itu, ketergantungan Indonesia kepada hutang luar negeri membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar (kurs).

Faktor lain yang ikut berpartisipasi dalam menyebabkan hyperinflasi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 yakni kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gagal di implementasikan (Sari & Fakhruddin, 2016). Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Syakur (2022) menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi yang di implementasikan oleh Bank Indonesia pada saat itu justru memperparah situasi dengan meningkatkan beban utang-utang perusahaan domestik yang sudah terjepit. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan PHK massal, yang kemudian memperburuk kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, dinamika ekonomi global juga memainkan peran yang krusial atas terjadinya hyperinflasi tahun 1997-1998 di Indonesia. Dimana, penelitian yang dilakukan oleh Iriansyah (2020) mengungkapkan bahwa krisis finansial yang bermula di Thailand lalu menyebar ke negara-negara yang ada di Asia. Dimana, hal tersebut menciptakan gelombang spekulasi yang memicu keluarnya modal secara besar-besaran dari indonesia. Kondisi ini semakin diperparah akibat lemahnya sistem perbankan domestik yang tidak siap dalam menghadapi arus balik modal yang besar, sehingga menyebabkan likuiditas mengering dan menambah tekanan pada nilai tukar dan inflasi.

Penelitian ini berorientasi untuk mengkaji akar dari hyperinflasi yang terjadi selama krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar-akar hyper inflasi selama krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menyumbangkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencegah terulangnya krisis yang serupa di masa yang akan datang.

Pembahasan

Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika

Pada Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengguncang fondasi ekonominya secara menyeluruh dan mendalam. Salah satu faktor yang dikaji sebagai penyebab utama dari krisis moneter (*hyperinflasi*) tersebut adalah melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Christianingrum (2022) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak terelakkan jika nilai tukar suatu mata uang (kurs) melemah. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2019) menunjukkan bahwa melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika mempunyai peran yang signifikan terhadap krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Dimana, melemahnya nilai tukar mata uang tersebut tidak hanya meningkatkan biaya impor barang-barang dan bahan baku, tetapi juga menyebabkan lonjakan inflasi yang signifikan. Dengan meningkatnya biaya import

barang dan bahan baku, hal tersebut sangat berdampak kepada masyarakat Indonesia, dimana mereka mengalami penurunan yang signifikan dalam konteks daya beli terhadap barang-barang dan bahan baku yang harganya semakin meningkat. Hal ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketidakstabilan makroekonomi secara keseluruhan (Saragih, 2016).

Di sektor keuangan, bank-bank dan lembaga keuangan lain yang terpapar terhadap utang dalam mata uang asing mengalami tekanan yang besar. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkatkan likuiditas dan solvabilitas institusi keuangan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional (Saragih, 2016). Perusahaan-perusahaan juga merasakan dampak langsung atas depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Mereka yang mempunyai hutang dalam mata uang asing menghadapi beban hutang yang meningkat secara signifikan dalam satuan rupiah (Saragih, 2016). Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan keuangan yang serius bahkan kebangkrutan dalam beberapa kasus (Saragih, 2016). Investor asing yang memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, juga terdampak atas fluktuasi (perubahan) dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Melemahnya mata uang rupiah membuat mereka enggan untuk berinvestasi di Indonesia atau bahkan memilih untuk menarik modal mereka dari pasar keuangan yang menyebabkan berkurangnya aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menciptakan ketegangan sosial yang mendalam bagi bangsa Indonesia (Sari & Fakhruddin, 2016). Ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh melemahnya nilai tukar yang menciptakan tekanan yang signifikan pada pemerintah serta mempercepat tuntutan untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi (Nirmaya et al., 2020). Dari paparan di atas, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terbukti sebagai faktor utama yang memicu krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998.

Tingginya Hutang Luar Negeri

Tingginya hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia (Na'im, 2001). Pada periode tersebut, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia yang mengalami lonjakan dalam jumlah hutang luar negeri. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan, karena negara-negara ini harus mengandalkan aliran modal asing untuk membiayai pembangunan dan menutupi defisit neraca pembayaran negara.

Pada akhir tahun 1990-an, nilai tukar mata uang di banyak negara Asia mengalami tekanan hebat akibat ketidakmampuan membayar hutang luar negeri (Yudiarti & Mustika, 2018). Di Indonesia, situasi ini diperparah oleh lemahnya fundamental ekonomi, termasuk defisit neraca perdagangan yang melebar dan inflasi yang tinggi. Ketika nilai tukar rupiah merosot tajam, beban hutang luar negeri dalam mata uang asing meningkat drastis, sehingga membebani perekonomian nasional (Harahap, 2013). Hutang luar negeri yang tinggi menyebabkan beban pembayaran bunga dan pokok hutang menjadi sangat besar. Pemerintah dan sektor swasta yang berhutang dalam dolar Amerika terpaksa harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk memenuhi kewajiban mereka.

Keadaan ini menciptakan tekanan likuiditas yang parah dan menguras cadangan devisa negara serta memperburuk kondisi krisis moneter (Na'im, 2001).

Pada saat yang sama, kelemahan dalam sistem perbankan dan korporasi di Indonesia memperparah dampak dari tingginya hutang luar negeri (Darmawan, 2022). Banyak bank dan perusahaan memiliki kewajiban dalam dolar Amerika tanpa adanya lindung nilai yang memadai. Ketika rupiah terdepresiasi, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban hutang berkurang, mengakibatkan kebangkrutan dan krisis kepercayaan di sektor keuangan (Na'im, 2001). IMF (*International Monetary Fund*) kemudian terlibat dalam upaya penyelamatan dengan menyediakan paket bantuan finansial kepada Indonesia (Aziza et al., 2019). Namun, syarat-syarat yang diberlakukan oleh IMF termasuk pengetatan fiskal dan reformasi struktural, memperberat kondisi ekonomi dalam jangka pendek (Farsia, 2021). Meskipun demikian, intervensi IMF dianggap penting untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan memperbaiki kepercayaan investor internasional.

Tingginya hutang luar negeri pada masa pra-krisis juga disertai dengan manajemen ekonomi yang kurang efektif, termasuk korupsi dan nepotisme yang merajalela. Banyak proyek yang dibiayai dengan hutang luar negeri tidak produktif dan gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Hal ini menambah beban pembayaran hutang tanpa adanya peningkatan kemampuan pembayaran dalam jangka panjang (Ibrahim et al., 2019). Sebagai pelajaran dari krisis moneter 1998, banyak negara, termasuk Indonesia berupaya untuk memperkuat kebijakan manajemen hutang dan memperbaiki kerangka kerja keuangan mereka. Langkah-langkah ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap arus modal asing, peningkatan transparansi dalam manajemen fiskal, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam membiayai pembangunan ekonomi.

Kebijakan International Monetary Fund (IMF) Yang Gagal

Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis moneter yang sangat serius, dengan salah satu faktor penyebab utama adalah tidak efektifnya solusi yang ditawarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) (Hermawandi, 2019). Krisis ini tidak hanya menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam, tetapi juga membawa dampak sosial dan politik yang signifikan. Banyak kritik yang ditujukan pada IMF karena penanganan krisis yang dianggap kurang efektif dan bahkan memperburuk kondisi ekonomi negara yang menerima bantuannya (Aziza et al., 2019). Pada masa itu, solusi yang ditawarkan oleh IMF umumnya berfokus pada kebijakan pengetatan moneter dan fiskal yang ketat (Farsia, 2021). *International Monetary Fund* (IMF) mendorong pemerintah Indonesia untuk menaikkan suku bunga dan mengurangi pengeluaran publik sebagai upaya untuk menstabilkan mata uang rupiah dan mengendalikan inflasi (Aziza et al., 2019). Namun, kebijakan ini justru memperburuk resesi ekonomi karena meningkatnya biaya pinjaman dan menurunnya investasi yang pada akhirnya mempengaruhi sektor riil ekonomi.

Kebijakan pengetatan moneter yang diterapkan oleh IMF menyebabkan banyak perusahaan lokal mengalami kesulitan keuangan (Farsia, 2021). Tingginya biaya pinjaman membuat perusahaan tidak mampu membayar utang, yang kemudian memicu

gelombang kebangkrutan di berbagai sektor. Selain itu, pemotongan anggaran publik yang signifikan mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi rakyat kecil. Salah satu kebijakan kontroversial lainnya adalah dorongan IMF untuk meliberalisasi pasar keuangan dan perdagangan secara cepat. Dalam situasi krisis, liberalisasi ini tidak menghasilkan stabilitas yang diharapkan, melainkan meningkatkan variasi harga perdagangan (volatilitas) di pasar dan membuat ekonomi Indonesia semakin rentan terhadap guncangan eksternal. Liberalisasi yang dipaksakan ini menyebabkan aliran modal keluar yang besar, yang semakin melemahkan nilai tukar rupiah.

IMF juga menekankan pentingnya restrukturisasi sektor perbankan yang dilanda krisis. Namun, proses ini dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya (Aziza et al., 2019). Penutupan sejumlah bank dan pengurangan karyawan secara besar-besaran meningkatkan tingkat pengangguran dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Langkah ini bukan memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan, melainkan justru menambah ketidakpastian dan kekhawatiran. Dampak kebijakan IMF tersebut tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, sementara tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat secara drastis (Farsia, 2021). Banyak keluarga jatuh ke dalam kemiskinan serta meluasnya ketidakpuasan sosial masyarakat yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan politik (Iriansyah, 2020).

Ketidakmampuan Pemerintah Dalam Menanggulangi Krisis

Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah (Sari & Fakhruddin, 2016). Hal tersebut berdampak luas kepada perekonomian dan stabilitas sosial Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi krisis tersebut adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis yang terjadi tersebut (Maulidia et al., 2023). Krisis ini dimulai dari melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang memicu terjadinya hyperinflasi serta mengurangi daya beli masyarakat. Permasalahan tersebut tidak bisa diatasi dengan efektif oleh pemerintah yang saat itu tidak mempunyai strategi yang jelas dan terkoordinasi untuk mengatasi permasalahan krisis yang semakin kompleks (Maulidia et al., 2023).

Pemerintah Indonesia saat itu menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal (Syakur, 2022). Ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap tekanan ekonomi global serta krisis kepercayaan yang melanda sistem perbankan domestik memperparah situasi (Iriansyah, 2020). Kebijakan-kebijakan yang diterapkan sering kali bersifat reaktif dan tidak mampu memberikan solusi jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan suku bunga tinggi yang dimaksudkan untuk menarik investasi asing justru menambah beban utang bagi perusahaan-perusahaan domestik yang sudah tertekan (Sakir et al., 2020). Selain itu, masalah kronis seperti korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan memperburuk kondisi. Kurangnya akuntabilitas di sektor publik mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, banyak keputusan ekonomi penting diambil berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek daripada

pertimbangan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, upaya untuk menstabilkan ekonomi sering kali gagal dan bahkan memperburuk krisis.

Krisis moneter juga diperburuk oleh lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya sering kali bertindak sendiri-sendiri tanpa ada sinergi yang memadai (Martanto et al., 2021). Misalnya, tindakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung dari Kementerian Keuangan, sehingga upaya stabilisasi ekonomi menjadi tidak efektif (Syakur, 2022). Selain itu, pemerintah saat itu juga tidak mampu mengelola hutang luar negeri dengan baik. Banyak perusahaan besar yang memiliki hutang dalam mata uang asing mengalami kesulitan pembayaran karena depresiasi rupiah yang tajam. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan dan dukungan kepada sektor swasta menambah tekanan pada ekonomi nasional, yang pada akhirnya memperdalam krisis moneter.

Krisis ini juga mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem perbankan Indonesia. Banyak bank yang tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk menahan gelombang penarikan dana oleh nasabah yang panik. Ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan reformasi perbankan yang diperlukan memperburuk krisis likuiditas di sektor ini, yang semakin memparah situasi ekonomi secara keseluruhan (Iriansyah, 2020). Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis juga disebabkan oleh keterlambatan dalam meminta bantuan internasional. Ketidakmampuan untuk segera bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund) memperlambat proses pemulihan (Farsia, 2021). Ketika bantuan akhirnya tiba, banyak syarat yang diberlakukan justru menambah beban ekonomi rakyat, yang kemudian memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Reaksi masyarakat terhadap ketidakmampuan pemerintah juga memperburuk situasi. Ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu aksi-aksi protes dan kerusuhan di berbagai daerah. Situasi keamanan yang tidak kondusif ini menyebabkan ketakutan di kalangan investor, baik domestik maupun internasional, yang pada akhirnya menambah aliran modal keluar dari Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Dari pemaparan diatas, penelitian ini mengkaji akar hyperinflasi selama krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998. Studi literatur menunjukkan bahwa, penyebab utama hyperinflasi yakni; melemahnya nilai tukar mata uang (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika, dilanjuti dengan tingginya hutang luar negeri, kebijakan international monetary fund (IMF) yang gagal, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis pada periode tersebut.

Daftar Pustaka

- Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). Analisis peran IMF terhadap fenomena inflasi tahun 1997-1998 di negara Thailand. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143>
- Christianingrum, R. (2022). Pengaruh variabel ekonomi makro terhadap nilai tukar

- rupiah. *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 43–63.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i1.28>
- Darmawan, I. (2022). Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. *15*(2), 57–69.
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2018). Perekonomian Indonesia sejarah dan perkembangannya. In *Analytical Biochemistry*, 11(1).
- Farsia, L. (2021). The role Of International Monetary Fund (IMF) in economic recovery during economic crisis of Indonesia. *Student Journal of International Law*, 1(1), 13–32. <https://doi.org/10.24815/sjil.v1i1.18074>
- Ginting, W. A., & Nasution, S. A. (2020). Pengaruh firm size, current ratio, dan total asset turnover terhadap profitabilitas melalui return on equity. *EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, 1(2), 79–85. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.vi1i2.64>
- Harahap, S. R. (2013). Deteksi dini krisis nilai tukar Indonesia: Identifikasi periode krisis tahun 1995 – 2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 446–455.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3215>
- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF): Studi kasus Indonesia 1997-1998, 3(2), 237–254.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/868>
- Ibrahim, S., Hidayat, W., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2000-2017. *JIE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 234–246. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i2.8255>
- Iriansyah, H. S. (2020). Krisis Asia, kapitalisme dan negara kesejahteraan. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277>
- Martanto, B., Tan, S., & Syurya Hidayat, M. (2021). Analisis tingkat inflasi di Indonesia tahun 1998-2020: Pendekatan error correction model. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 619–632. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14360>
- Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Faktor-faktor krisis dan dampak krisis yang pernah terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan kerapuhan fundamental. *SSCJ: Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 181–193.
<https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>
- Na'im, A. (2001). Hutang luar negeri pemicu krisis ekonomi Indonesia. *UNISIA*, 1(43), 515–527.
- Nirmaya, D. N., Farabi, F. F., & Lumbantobing, I. A. (2020). Pengaruh krisis moneter dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 129–141.
- Sakir, A., Zainul, Z. rizqi, & Zulkifli. (2020). Faktor-faktor penyebab pelemahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. *Journal Of Economic And Bussines*, 17(2), 2020–2165.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Saragih, J. P. (2016). Depresiasi rupiah terhadap dolar AS dan pengaruhnya terhadap ekspor dan impor. *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 1(1), 78–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i1.29>
- Sari, P. K., & Fakhruddin. (2016). Identifikasi penyebab krisis moneter dan kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus krisis tahun 1997-1998. *JIM EKP: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377–388.
<https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831>

- Syakur, R. M. (2022). Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Universitas Hasanudin*. 1–72.
- Yudiarti, T., & Mustika, C. (2018). Pengaruh utang luar negeri, tingkat suku bunga dan neraca transaksi berjalan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 6(1), 14–22.